

**MENGUNGKAP MAKNA *SANGKEPAN* SEBAGAI MEKANISME
AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN KINERJA KEUANGAN DI LPD
DESA ADAT BANYUASRI**

Oleh

Putu Anggi Riani Putri, NIM1917051172

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengelola sumber daya ekonomi yang bersumber dari dan ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa adat, sehingga pengelolaannya memerlukan pertanggungjawaban yang dapat dipahami oleh *krama* desa. Penelitian ini bertujuan mengungkap pelaksanaan serta makna *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan pada LPD Desa Adat Banyuasri ditinjau dari teori *stewardship* dan nilai-nilai *Tri Hita Karana*. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan desain studi kasus interpretif. Data bersumber dari wawancara dengan Ketua LPD dan Sekretaris Desa Adat yang dapat ditelusuri dalam lampiran, observasi pelaksanaan *sangkepan*, serta dokumentasi laporan keuangan dan kegiatan. Data dianalisis melalui transkripsi, kondensasi data, pengodean, pengelompokan kategori, penyajian tema, dan penarikan simpulan dengan pengecekan silang antarsumber dan antarmetode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sangkepan* berlangsung melalui tahap persiapan, pembukaan, inti, dan penutup. Pada tahap inti, *pengelola* LPD menyampaikan kondisi dan hasil usaha secara lisan serta tertulis kepada *prajuru* dan *krama*, memberikan penjelasan, menerima pertanyaan dan saran, serta membahas permasalahan dan tindak lanjut melalui musyawarah. Proses tersebut memenuhi unsur hubungan akuntabilitas karena terdapat pihak yang menerima amanah, forum penerima pertanggungjawaban, informasi yang disampaikan, kesempatan meminta penjelasan, evaluasi komunal, dan keputusan bersama. Dalam perspektif *stewardship*, *pengelola* LPD dimaknai sebagai pihak yang mengelola amanah untuk kepentingan kolektif dan menjaga kepercayaan masyarakat. Nilai *parahyangan* tampak pada doa dan sarana upacara, *pawongan* pada dialog, kebersamaan, dan musyawarah, sedangkan *palemahan* hanya didukung secara terbatas oleh praktik menjaga kebersihan dan ruang pertemuan. Dengan demikian, *sangkepan* dimaknai sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan berbasis adat yang mengintegrasikan pelaporan, penjelasan, partisipasi, dan nilai budaya dalam satu forum pertanggungjawaban langsung.

Kata kunci: akuntabilitas keuangan; Lembaga Perkreditan Desa; *sangkepan*; *stewardship*; *Tri Hita Karana*.

**MENGUNGKAP MAKNA *SANGKEPAN* SEBAGAI MEKANISME
AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN
KINERJA KEUANGAN DI LPD DESA ADAT BANYUASRI**

By

Putu Anggi Riani Putri, NIM 1917051172

Departement of Economics and Accounting

ABSTRACT

Village Credit Institutions (Lembaga Perkreditan Desa or LPDs) manage economic resources originating from and intended for customary village communities. Their management therefore requires an accountability process that community members can understand and question. This study explores the implementation and meaning of sangkepan as a financial accountability mechanism at the LPD of Banyuasri Customary Village through stewardship theory and the values of Tri Hita Karana. The study adopted a qualitative interpretive case-study design. The traceable evidence comprises interviews with the LPD Chair and the Customary Village Secretary, observation of sangkepan proceedings, and documentation of financial reports and community meetings. Data were analysed through transcription, data condensation, coding, category development, thematic display, and conclusion drawing, supported by cross-checking across sources and methods. The findings indicate that sangkepan is conducted through preparation, opening, core discussion, and closing stages. During the core stage, LPD managers present financial conditions and business results orally and in writing to customary village officials and community members, provide explanations, respond to questions and suggestions, and discuss problems and follow-up actions through deliberation. These practices demonstrate an accountability relationship because they involve an entrusted actor, an accountability forum, disclosed information, an opportunity to request explanations, communal evaluation, and collective decision-making. From a stewardship perspective, LPD managers are understood as stewards who administer entrusted resources for collective interests and sustain public trust. Parahyangan is reflected in prayers and ritual facilities, pawongan in dialogue, solidarity, and deliberation, while evidence for palemahan is limited to maintaining cleanliness and the meeting space. The study concludes that sangkepan is a customary-based financial accountability mechanism that integrates reporting, explanation, participation, and cultural values within a direct accountability forum.

Keywords: financial accountability; Lembaga Perkreditan Desa; sangkepan; stewardship; Tri Hita Karana.

